

PERJUANGAN POLITIK DARI LUAR LINGKARAN

KEKUASAAN :

Struktur Mobilisasi Partai Rakyat Demokratik pada Pemilu 1999

M. Rolip Saptamaji
Universitas Padjadjaran
Program Magister, Program Studi Ilmu Politik
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
padjadjaran
Jl. Bukit dago Utara No. 25 Bandung 40135
Email: sendjamerah@gmail.com

Abstrak

Pemilu 1999 adalah awal dari keterbukaan politik di Indonesia. dimulai dengan diperbolehkannya pembentukan partai politik diluar tiga partai yang ditentukan oleh Orde Baru. Fasilitasi pemilu tersebut merupakan konsekuensi logis sebagai upaya re-organisasi negara setelah keberhasilan gerakan massa menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada peristiwa reformasi 1998. Salah satu kontestan pemilu tersebut adalah PRD yang dikategorikan sebagai partai kiri.

Meskipun PRD menjadi simbol radikalisme melawan Orde Baru, partai ini tidak mendapatkan jumlah suara yang signifikan pada pemilu 1999. Fenomena tersebut diteliti menggunakan teori proses politik dan teori analisa kelas dalam perspektif Marxisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan PRD pada pemilu 1999 disebabkan oleh kontradiksi antara struktur mobilisasi gerakan politik dengan struktur partai pada pemilu.

Kata kunci : Aksi, massa, mobilisasi, partai, pemilu, politik

Abstract

The election in 1999 was the beginning of political openness in Indonesia. Began with probation to build new political parties beside the three party which determinde by the New Order Goverment. The election fasilitation is the logical cosequences ti the state reorganisation after the success of people power movement overthrowing the New Order Regime on reformation event in 1998. One of the election contestant is the PRD which categorised as the left party. Eventhough PRD became the radicalism symbil against the New Order, this party was not get enough sinificant voters in tehe 1999's election. This research used the political process theory and the marxist class analysis to explain this phenomena. The result of this research shows that the failure of the PRD in 1999 election because of tje contradiction between the mobilisation structure of political movement to the election party structure.

Keywords: action, mass, mobilization, election, party, politics

A. Pendahuluan

Keruntuhan Orde baru yang berkuasa selama tiga dekade di Indonesia menandai era baru keterbukaan politik yang dimulai dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berorganisasi dan membentuk partai politik dan menjadi peserta pemilu 1999. Keterbukaan politik tersebut tidak datang tiba-tiba melainkan melalui perjuangan panjang gerakan-gerakan demokratik melawan sentralisasi politik Orde Baru. Sebelumnya, peluang politik diluar lingkaran elit pendukung Orde Baru tidak pernah dibuka, partai politik dibatasi baik secara jumlah maupun aktivitas, organisasi masyarakat diintegrasikan kedalam kantong-kantong organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan aktivitas politik diluar ketentuan doktrin Pancasila dilarang.

Tertutupnya ruang-ruang aspirasi politik tersebut diperkuat oleh represi negara terhadap potensi oposisi melalui struktur intelejen dan militer. Namun, kuatnya represi politik ini malah menimbulkan perjuangan politik dari luar lingkaran kekuasaan. Diawali dengan protes moralis gerakan golongan putih pada tahun 1971 yang disusul dengan protes mahasiswa pada tahun 1974 dan 1978, kekuatan politik masyarakat sipil terus berkonsolidasi diluar lingkaran kekuasaan negara.

Ketika kekuasaan sentralistik Orde Baru mulai kehilangan legitimasi karena meningkatnya represi negara dan krisis ekonomi pada tahun 1996 hingga 1998, kekuatan politik yang direpresi oleh Orde Baru mulai mengkristal menjadi oposisi-oposisi baru baik di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan. Salah satu kekuatan politik diluar kekuasaan negara yang muncul pada periode tersebut adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mengadopsi tendensi sayap kiri dan menggunakan strategi aksi massa sebagai strategi politik utamanya.

Metode aksi massa ini mulai diadopsi oleh berbagai komite-komite aksi mahasiswa dan organisasi-organisasi sipil lainnya secara massif di berbagai daerah. Pada tahun 1998, gelombang protes dan aksi massa yang memuncak di Jakarta pada bulan Mei berhasil mendongkel Orde Baru dari kekuasaan. Kondisi berubah ketika pada tahun 1999, pemerintahan Habibie yang ditunjuk sebagai pengganti Soeharto menyelenggarakan pemilu dan memfasilitasi kontestasi kekuasaan berbagai kekuatan politik baru yang muncul pasca Orde Baru melalui

pemilihan umum. PRD yang sebelumnya menggunakan metode insureksi tidak bersenjata melalui aksi massa terpaksa merubah struktur mobilisasinya untuk menyesuaikan dengan syarat administratif pemilu dan mengalami kegagalan karena jumlah suara yang didapatkan tidak signifikan sehingga PRD terlempar dari kontestasi kekuasaan dalam pemerintahan Reformasi.

Pada artikel ini, penulis menempatkan perjuangan politik sebagai kontestasi antara dua sumber kekuatan politik yaitu antara massa rakyat dan kekuasaan negara. Strategi mobilisasi Massa menjadi kekuatan politik yang digunakan oleh kelompok politik yang belum mapan dan berada diluar kekuasaan negara untuk melawan negara dan merebut negara dari kelompok politik yang menguasainya. Kelompok politik yang mapan menggunakan kekuasaan negara untuk mempertahankan kemapanannya dalam hirarki politik. Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk memperlihatkan bagaimana kegagalan transformasi strategi mobilisasi massa PRD menghadapi peluang politik berupa fasilitasi negara seperti pemilu.

B. Metode

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Peneliti juga menggunakan teori proses politik untuk menjelaskan struktur mobilisasi PRD yang dijadikan sebagai objek kajian dalam tulisan ini. Melalui teori proses politik, peneliti menyusun studi kepustakaan dengan menggunakan katalog peristiwa politik yang dialami oleh PRD menjelang pemilu 1999.

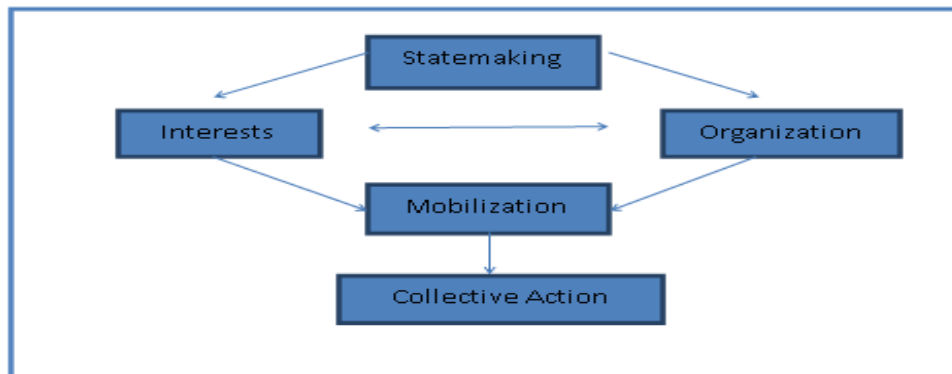
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori proses politik sebagai model analitis dan teori kelas sosial dalam perspektif Marxis untuk menemukan acuan pembentukan struktur mobilisasi PRD. Teori ini digunakan karena PRD menggunakan analisa kelas Marxisme yang dikembangkan dalam pendekatan analisa politiknya untuk menentukan aktor politik dalam transformasi sosial. Pandangan kelas tersebut menempatkan PRD sebagai merupakan salah satu representasi politik sayap kiri di Indonesia yang muncul ketika melemahnya Orde Baru.

a. Teori struktur mobilisasi

Struktur mobilisasi adalah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk didalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial, tujuannya mengambil posisi-posisi yang dianggap strategis dalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi. dalam konteks ini melibatkan unit-unit keluarga, jaringan pertemanan, unit-unit tempat bekerja dan elemen-elemen negara. Mc Carthy dalam Tarrow (Tarrow. 1986;71) menyebutkan bahwa struktur mobilisasi memiliki dua kategori yaitu kategori formal dan informal. Kategori formal meliputi lembaga dan kelompok masyarakat yang terorganisir, sedangkan kategori informal adalah jaringan kekerabatan dan pertemanan.

Tilly (1978) mengembangkan sebuah model analisa proses politik untuk menganalisa bentuk aksi kolektif yang dipilih oleh organisasi sipil dalam peristiwa revolusi dan pemberontakan politik di Inggris dan Amerika pada abad 18. Model ini adalah model dasar bagi analisa sekuensi historis dalam analisa struktur mobilisasi proses politik. Tilly membagi model analisa proses politik pada dua bagian yaitu bagian abstrak dan bagian kongkrit. Bagian abstrak terdiri dari; *statemaking*, *interests*, *organization*, *mobilization* dan *collective action*. Sementara, bagian kongkrit merupakan praktik simulatif dari model abstrak. *Statemaking* adalah situasi politik yang dihadapi oleh organisasi dan diinterpretasikan dalam tuntutan politik. *Interests* adalah kepentingan organisasi yang dijadikan program politik organisasi. *Organization* adalah persoalan yang dihadapi oleh organisasi atau kondisi internal organisasi. *Mobilization* adalah pilihan strategi politik organisasional. *Collective action* adalah aksi taktis yang dilakukan oleh organisasi. Tilly menggambarkan bahwa *statemaking* merupakan unsur utama yang menentukan bentuk *interest* dan *organization*. Interaksi antara program politik dan organisasi menghasilkan pilihan strategi politik dan aksi kolektif atau aksi taktis.

Gambar 1. Struktur Mobilisasi



(Sumber: Tilly. 1978; 230)

Pada konteks PRD sebagai representasi politik sayap kiri yang menggunakan pendekatan kelas Marxisme, statemaking dalam model ini dapat diamati dari ideologi politiknya.

b. Teori kelas Marxisme

Analisa kelas merupakan pembeda sekaligus indikator dari implementasi Marxisme dalam praktik politik. Analisa kelas merupakan landasan utama dari praktek politik marxisme. Dalam marxisme, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kesatuan yang memiliki kepentingan yang sama. Marxisme berpendapat bahwa masyarakat tersusun dari berbagai konfigurasi kelas yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks pandangan kelas Marxisme dimana populasi telah terbelah dalam dua kubu yaitu borjuasi sebagai minoritas pemilik alat produksi dan proletariat sebagai mayoritas yang tidak memiliki alat produksi maka dibutuhkan mekanisme yang memastikan kepentingan mayoritas dapat direpresentasikan. Dekonstruksi radikalnya adalah dengan mentransformasikan kepemilikan pribadi tersebut menjadi kepemilikan komunal oleh kaum proletariat yang mayoritas sehingga mendorong transformasi sosial pada hilangnya kelas-kelas dalam masyarakat. Disinilah sudut radikal yang memulai interpretasi politik dalam Marxisme.

Analisa kelas berkembang dengan cara yang berbeda di negara dunia ketiga seperti Amerika Latin mengembangkan kategori politik yang lebih longgar dari

analisa struktural. Konfigurasi kelas di Amerika Latin tidak mengalami kristalisasi pada kubu-kubu yang berlawanan dalam relasi produksi, meskipun ada jumlahnya tidak signifikan. Kaum miskin urban adalah jumlah penduduk dominan di negara-negara Amerika latin. Disusul dengan para petani tak bertanah dan kaum adat yang didiskriminasi secara politik. Konfigurasi ini membelah kondisi sosial-politik pada dua kelompok yang berlawanan dalam kategori politik yang longgar yaitu kaum elit dan massa. Elite diasosiasikan pada kelompok orang yang mendapatkan keuntungan kapitalisme, sementara massa adalah kelompok yang terkena dampak kapitalisme yang juga disebut sebagai kelas populer.

Model ini berkembang pada pemerintahan Salvador Allende di Chile (1971-1973) melalui eksperimen jalan demokratis menuju sosialisme di Chile atau lebih dikenal sebagai *La via Chilena* (Budiman, 1987: 126). Allende yang maju menjadi Presiden melalui Unidad popular yang merupakan aliansi partai-partai kiri seperti Partai Komunis Chile, Partai Sosialis dan organisasi-organisasi kiri mendasarkan kekuatannya pada rakyat yang terdiri dari kaum buruh dan pengangguran di kota dan di desa. Allende menggunakan istilah *Poder Popular* atau kekuatan rakyat untuk menempatkan rakyat sebagai aktor politik transformasi sosial menuju sosialisme di Chile. Unidad Popular dalam program umumnya menegaskan bahwa revolusi hanya akan berhasil jika rakyat Chile memegang kekuasaannya di tangan sendiri (Budiman, 1987; 126). Meskipun begitu, konsep kekuatan rakyat sendiri tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh Unidad Popular.

Dalam pengelompokan kelas Marxian, yang disebut sebagai kelas populer terdiri dari kelas semi proletariat, borjuis kecil, semi proletariat hingga lumpen proletariat. Harnecker menjelaskan komposisi rakyat yang menerima konsekuensi kapitalisme termasuk sektor tradisional, kelas pekerja urban dan desa, kaum miskin yang terpinggirkan, strata pendapatan menengah, hingga polisi dan tentara berpangkat rendah, dan lainnya (Harnecker, 2007;28). Konfigurasi yang sangat beragam ini ditentukan oleh dampak kapitalisme berdasarkan stratum ekonomi bukan berdasarkan relasi produksi. Dampak dari kapitalisme bisa dirasakan beragam, begitupun juga kepentingan kelompok dalam kelas populer tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Latar Politik Orde Baru

Pembentukan struktur mobilisasi dan peluang politik pada akhir periode kekuasaan Orde Baru (1996-1998) dibentuk oleh struktur peluang tertutup yang dibuka oleh rangkaian peluang politik dan konsolidasi kekuatan politik diluar kekuasaan negara. Represi Orde Baru dimulai sejak tahun keempat rezim ini berkuasa. Pada tahun 1971 kelompok mahasiswa yang sebelumnya berpihak pada Orde Baru untuk menggulingkan pemerintahan Orde Lama mulai melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Setahun berikutnya penangkapan aktivis mahasiswa mulai dilakukan oleh pemerintah. Eskalasi protes semakin memuncak pada 15 Januari 1974 ketika demonstrasi protes semakin meluas dan menghasilkan kerusuhan. Aksi ini diredam dengan menangkap tokoh-tokoh mahasiswa yang terkait dengan GMSOS yang dianggap berada dibelakang aksi protes mahasiswa.

Setelah penangkapan tersebut, mahasiswa masih terus mengkritik pemerintahan Orde Baru melalui isu-isu korupsi, penyelewengan kekuasaan dan kesenjangan ekonomi (Lane, 2004, 222). Namun isu ini hanya berkisar pada kalangan mahasiswa dan tidak menyentuh kalangan lainnya. Meskipun begitu, konsolidasi mahasiswa yang semakin meluas tersebut tidak disepelekan oleh rezim karena dapat membuka peluang kemunculan kembali oposisi politik dan mengancam stabilitas ekonomi negara.

Meningkatnya intensitas konsolidasi mahasiswa yang terkonsentrasi pada aksi ikrar tunggal di Bandung pada tanggal 28 November 1978 direspon dengan pernyataan keras oleh ABRI. Melalui Soedomo, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menyatakan bahwa ikrar tunggal mahasiswa yang menyatakan bahwa Presiden telah menyeleweng dari UUD 1945 berarti melawan kekuasaan MPR (Miftahudin. 2004;56). Selain itu, mahasiswa melalui Dewan Mahasiswa juga dianggap merendahkan lembaga negara dan membangun opini untuk mengganti kepemimpinan nasional. Oleh karena itu ABRI menyatakan bahwa tindakan represif akan diambil untuk merespon aktivitas mahasiswa tersebut.

Pada tahun yang sama, Orde Baru mengambil kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) dan membubarkan Dewan Mahasiswa. Kebijakan NKK/BKK diambil untuk melakukan penyusunan ulang kehidupan kampus dengan membentuk badan koordinasi kampus yang melakukan pengendalian terhadap aktivitas mahasiswa (Miftahudin, 2004: 55). Sejak saat itu mahasiswa menghadapi represi langsung dari rezim Orde Baru. Pada kehidupan sosial diluar kampus, Orde Baru menggunakan struktur komando teritorial untuk mengawasi aktivitas sipil dan mewaspadai peluang terbentuknya kekuatan oposisi. Komando teritorial ini dibentuk dengan nama badan Koordinasi Stabilitas Nasional (BAKORTRANAS). Pada tahun 1973 Orde baru menetapkan fusi partai berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hasil Sidang MPR Tahun 1973. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa pemilu 1977 hanya diikuti oleh tiga peserta yaitu dua Partai Politik dan satu Golongan Karya yang ditentukan berdasarkan Orientasi politik tersebut dikelompokkan melalui kelompok materiil-spirituil (PNI, Partai Murba, IPKI, Parkindo) dan kelompok spirituil (PSII, Masyumi dan NU). Cengkraman hegemoni Orde Baru juga menjangkau hingga organisasi massa dengan mendirikan berbagai organisasi massa dan berfiliasi kepada GOLKAR¹. Orde Baru juga pada tahun 1985 menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal yang harus menjadi asas bagi semua organisasi masyarakat dan organisasi politik. ketatnya cengkraman hegemoni Orde Baru berhasil menutup peluang munculnya oposisi terhadap Orde Baru sekaligus memperluas jangkauan kekuasaannya, sehingga gerakan oposisi hanya mungkin lahir diluar lingkaran Orde Baru.

b. Konsolidasi Kekuatan Politik Diluar Lingkaran Kekuasaan

Pada akhir dekade 1980, kontrol Orde Baru terhadap organisasi berbasis penelitian dan advokasi yang disebut sebagai LSM/NGO mulai mengendur. Organisasi-organisasi ini kebanyakan diisi oleh para mantan aktivis mahasiswa 1970an dan banyak merekrut mahasiswa sebagai anggotanya. Secara historis

¹ Pada saat itu, Orde Baru tidak mengkategorikan Golkar sebagai partai politik melainkan organisasi payung bagi berbagai organisasi massa yang juga menjadi peserta pemilihan umum. Golkar juga merupakan fondasi politik rezim Orde Baru yang selalu menjadi pemenang pemilu sejak pemilu 1974 hingga pemilu 1997.

LSM/NGO tersebut berhubungan dengan kelompok-kelompok politik lama yang pernah direpresi oleh Orde Baru. Spektrum politik dai LSM/NGO pada saat itu terdiri dari kelompok sosial demokrat yang berhubungan dengan PSI dan kelompok politik berbasis agama seperti pemuda Protestan, Katolikm atau kelompok islam modern (Bourchier, Hadiz, 2003; 169). Kontak antara mahasiswa dengan organisasi tersebut memungkinkan para mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan politik dan bersentuhan langsung dengan rakyat.

Dekade 1980an juga merupakan dekade eskalasi represi negara terhadap rakyat di bidang perburuhan dan pertanian. Peristiwa besar yang terjadi pada periode tersebut adalah peristiwa perlawanan petani terhadap pengambilalihan lahan oleh pemerintah di Kedung Ombo pada tahun 1989. Rentetan kasus yang serupa menyusul setelah kejadian Kedung Ombo seperti di Blangguan, Cimacan, Talangsari dan Way Kambas. Kontak mahasiswa dan para aktivis dengan para petani yang sedang mengalami represi negara tersebut berhasil menciptakan radikalisasi di kalangan mahasiswa dan menghasilkan terbentuknya komite-komite solidaritas mahasiswa.

Pada awal 1990an gejala perpecahan di dalam tubuh pemerintahan Orde baru dan munculnya oposisi-oposisi elit legal mula terlihat. Orde Baru mencoba mendongkel dua tokoh populis dari posisinya di partai politik yaitu Megawati Soekarnoputri di PDI melalui kongres PDI di Medan yang menetapkan Soerjadi sebagai ketua PDI dan Abdurrahman Wahid di Nahdlatul Ulama, salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia, melalui penempatan Abu Hasan Rivai melawan pencalonan Abdurrahman Wahid pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 di Cipasung Jawa Barat.

Media massa yang sebelumnya mendukung Orde Baru ataupun berada dalam posisi pasif mulai memberitakan keburukan rezim. Menghadapi ini, Orde baru melakukan pembredelan terhadap majalah tempo, Editor dan Detik. Namun, kontrol represi tersebut menciptakan perluasan isu solidaritas yang berkembang menjadi isu perlawanan terhadap Orde Baru.

Di sisi lain, jaringan mahasiswa radikal bernama Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang terbentuk pada tahun 1992

mendeklarasikan alat politik yang merangkun spektrum oposisi dengan bendera Persatuan Rakyat Demokratik pada tahun 1994. Dua tahun kemudian, organisasi ini berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Rakyat Demokratik (PRD). Partai ini menyatakan sikap opoisinya terhadap pemerintahan Orde Baru dan menuntut pencabutan fondasi kekuasaan Orde Baru yaitu lima paket Undang-Undang politik dan Dwifungsi ABRI.

c. Struktur Mobilisasi Partai Rakyat Demokratik

Partai Rakyat Demokratik memainkan peranan penting dalam momentum reformasi 1998. Partai ini mengenalkan kembali metode aksi massa sebagai metode perjuangan politik melawan kediktatoran Orde Baru. Perluasan dan daya jangkau propagandanya yang cepat mampu meningkatkan jumlah mobilisasi aksi massa mendelegitimasi kekuasaan Orde Baru. Pentingnya peran PRD pada momentum krisis Orde Baru pada 1996-1998 dapat dilihat dari respo represi rezim terhadap partai ini. Hanya lima hari setelah partai ini dideklarasikan, Orde Baru memerintahkan penangkapan dan penculikan terhadap pimpinan dan aktivis partai ini. Represi politik yang dihadapi oleh PRD mendorongnya untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi objektif yang dihadapinya dengan mengembangkan metode aksi kolektif yang mampu mengendurkan legitimasi politik terhadap represi rezim untuk merebut kekuasaan.

Adaptasi terhadap kondisi politik objektif tersebut bergantung pada perumusan kepentingan politik organisasi dan bentuk organisasi yang dikembangkan untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks PRD yang dikategorikan sebagai partai “kiri” atau partai yang mengadopsi analisa kelas Marxian kita perlu melihat varian pendekatan Marxian yang digunakan oleh partai ini.

Pada analisa politiknya, PRD yang dibentuk dari aktivis radikal yang didominasi oleh mahasiswa menggunakan analisa kelas Marxian untuk memilih aktor politiknya. PRD membelah populasi di Indonesia kedalam dua kubu besar yaitu rakyat dan non rakyat. Pada periode Orde Baru, istilah “rakyat” sebagai kategori politik penanda populasi digantikan oleh istilah “masyarakat”. Meskipun begitu, istilah “rakyat” yang sering digunakan sebagai kategori politik anti-kolonialisme

pada masa pergerakan pra 65 masih memiliki muatan radikal dan mengingatkan pada gerakan anti kolonial.

Pemilahan yang dilakukan PRD meskipun terlihat sangat Marxian karena mengadopsi teori konflik dan memandang populasi sebuah negara sebagai elemen dialektis yang saling bertentangan sebenarnya memiliki perbedaan dengan analisa kelas Marxian. Analisa kelas Marxian menempatkan aktor politiknya berdasarkan relasi produksi dalam sistem kapitalisme. Sedangkan kategori “rakyat” yang digunakan oleh PRD ditentukan berdasarkan substratum ekonomi.

PRD menjelaskan bahwa rakyat adalah mereka yang dirugikan oleh sistem kapitalisme. Dengan kata lain kelompok sosial diluarnya yang diuntungkan oleh sistem kapitalisme masuk kedalam kategori non-rakyat. Analisa kelas seperti ini menyerupai analisa kelas Neo Marxis yang berkembang di Amerika Latin, yang juga menempatkan kelas populer (rakyat) sebagai aktor politiknya.

Pertimbangan utama dari pilihan analisa kelas ini adalah bahwa di negara dunia ketiga, corak produksinya masih jauh tertinggal dari negara maju. Hal ini menyebabkan analisa kelas model Marxian klasik yang berkembang di Eropa tidak dapat diterapkan di negara dunia ketiga karena jumlah kelas proletariat yang minim dan kuatnya corak produksi pra kapital di negara tersebut. Rakyat atau kelas populer tersebut dalam analisa Marxian memiliki konfigurasi yang lebar dari kelas borjuis kecil (petani, pemilik toko, kaum intelektual miskin), semi proletariat (pekerja informal, pedagang, buruh kontrak, buruh lepas harian, buruh tani), hingga lumpen proletariat (gembel, preman, pelacur). Akibatnya kelas populer sangat rentan pada disintegrasi kesadaran politik karena kepentingan politik yang berlainan didalamnya.

Dengan membelah populasi dan menentukan aktor politiknya, PRD mengembangkan analisa radikal bahwa kekuasaan negara yang selama tiga dekade dipegang oleh elit atau kelompok non-rakyat telah menciptakan kesenjangan dan kemiskinan. Posisi politik radikal pendekatan Marxian yang diambil oleh PRD adalah merombak struktur politik dari bawah. Artinya

kekuasaan negara harus dikembalikan kepada rakyat atau kelas populer melalui komite-komite politik yang dibangun oleh kelas populer.

Ketika pandangan politik ini menghadapi kondisi objektif Orde Baru yang represif dan menutup ruang aspirasi politik, maka kekuasaan tidak dapat direbut tanpa paksaan. Menghadapi kondisi ini PRD mengembangkan struktur mobilisasi dengan mekanisme organisasi yang ketat dan hirarkis mengikuti konsep organisasi Leninis. PRD juga mengembangkan metode aksi massa untuk mendelegitimasi hegemoni politik rezim dan menunjukkan perlawanan terorganisir sebagai antitesa dari kepasifan massa secara politik. pengorganisasian aksi massa dilakukan oleh PRD melalui metode *klandestin* tidak muncul di permukaan sebagai PRD melainkan bersublimasi menjadi komite-komite aksi karena ancaman penangkapan dan penculikan yang dihadapi oleh PRD.

Metode ini secara efektif mampu merespon eskalasi politik selama menjelang runtuhnya Orde Baru. PRD bahkan dapat mengintervensi front politik oposisi dalam gerakan Mega-Bintang-Rakyat (MBR). Maka, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi peluang politik tertutup dan represif, PRD membentuk struktur mobilisasinya berlandaskan pada strategi aksi massa sebagai aksi kolektif untuk merebut kekuasaan secara paksa.

d. Transformasi Peluang Politik: Dari represi ke fasilitasi

Pada teori proses politik, peluang politik yang dihasilkan dari aksi kolektif memiliki dua jenis implikasi yaitu represi dan fasilitasi. Kedua bentuk peluang politik tersebut dapat terjadi secara bersamaan, secara terpisah maupun bergantian secara gradual. Perubahan peluang politik juga menyebabkan perubahan struktur mobilisasi pada organisasi politik.

Menjelang keruntuhan Orde Baru, respon rezim terhadap aksi kolektif massa adalah represi militer. Hasilnya solidaritas politik menjalar dengan cepat dan radikalisasi massa pun terjadi. Orde Baru tidak mampu menghadapi gelombang protes yang terus bertambah dan terbelahnya konsolidasi rezim. Orde Baru pun menyerah pada kekuatan massa dan diakhiri oleh pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden pada tahun 1998.

Pemerintahan pengganti Orde Baru dibawah Habibie mengambil jalan berbeda dari respon politik Orde Baru sebelum 1998. Habbibie memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada april 1999. Pemilu tersebut merupakan bentuk fasilitasi rezim kepada kekuatan politik diluar kekuasaan negara untuk menjadi bagian dari negara.

Fasilitasi rezim tersebut menimbulkan perdebatan panjang di dalam tubuh PRD yang masih mempropagandakan pembersihan sisa-sisa Orde Baru dan pencabutan fondasi politik Orde Baru. Perdebatan tersebut dimanifestasikan pada slogan pemilu PRD 1999, yaitu: “Bersama Mahasiswa-Rakyat Boikot Pemilu atau Coblos PRD”. Secara organisasional PRD sebenarnya tidak pernah menyiapkan struktur partai politik dalam logika partai politik legal. Konfigurasi anggota PRD yang didominasi oleh mahasiswa dan aktivis radikal tersebar mengikuti alur konflik elit dan konflik sosial. Sehingga ketika dibutuhkan verifikasi administratif dan pemenuhan struktur berdasarkan struktur administratif negara, PRD mengalami kesulitan.

Persoalan lain adalah bahwa kelompok politik lainnya lebih mudah membentuk struktur teritorial dan memiliki dana organisasional yang menunjang karena tidak terlibat dalam gerakan penggulingan Orde Baru. Sementara, secara internal PRD membutuhkan transformasi struktur mobilisasi dari gerakan politik yang berbasis konflik menjadi partai politik yang berbasis suara. Hasilnya pada pemilu 1999 PRD hanya mendapatkan 78.000 suara dan tersingkir dari peta konsolidasi politik pasca Orde Baru.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan paparan pada hasil dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa struktur mobilisasi PRD sangat mengandalkan eskalasi peluang politik yang berasal dari konflik untuk merebut kekuasaan secara paksa. Aksi kolektif yang dirumuskan dan dipraktekkan oleh PRD melalui mobilisasi aksi massa memiliki keunggulan dalam struktur peluang politik tertutup yang menghasilkan respon represif. Sebaliknya aksi kolektif ini lemah terhadap struktur peluang politik terbuka seperti pemilihan umum yang mengharuskan struktur partai politik tersebar mengikuti wilayah administratif negara.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada tim pembimbing, Prof.H. Dr. Drs. Utang Suwaryo., M.A dan DR.H. Nandang Alamsyah yang telah memberikan arahan baik secara konsep maupun metode penulisan dalam penelitian ini. Tidak lupa, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada DR. Arry Bainus., M.A dan Prof. DR. Drs. H. Dede Mariana., M.Si yang telah memberikan masukan pada penelitian ini. Rasa terimakasih juga peneliti haturkan kepada kawan-kawan PRD dan KBRD yang telah merelakan waktunya untuk bertukar informasi dan berdiskusi mengenai penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.

Daftar Pustaka

- Bourchier,D. Hadiz,V. 2003. Indonesian Politics and Society A Reader. London: Routledge.
- Budiman, Arief. 1987. Jalan Demokratis menuju Sosialisme: Pengalaman Chile di Bawah Allende. Sinar Harapan. Jakarta
- Creswell, J. W. 2010. Research design ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.Terjemahan Achmad Fawaid, et.al. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Harnecker. M. 2007. *Rebuilding The Left*. London : ZedBooks
- Lane, M. R. 2009.. Mass Mobilisation in Indonesian Politics, 1960-2001: towards a class analysis. Dipetik February 14, 2013, dari www.ro.uow.edu.au: <http://ro.uow.edu.au/theses/3045>
- Marx, K. 1970. Critique of the Gotha Programme 1875. Dalam F. E. Karl Marx, Marx/Engels Selected Works, Volume Three, hlm. 13-30. Moskow: Progress Publisher.
- Marx, K. Engels, F. (1999). Manifesto Partai Komunis. Jakarta: Yayasan Bacaan Rakyat
- Meyer, D. S. 2004, February 10. Annual Review Sociology. *Protest and Political Opportunities*, hal. 125-141.
- Miftahuddin. (2004). *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*. Jakarta: Desantara.

- PRD. 1999. *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*. Jakarta: Partai Rakyat Demokratik.
- Tilly, C. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.
- Tilly, C. 1995. *To Explain Political Process*. *The American Journal of Sociology*, 1594-1610.
- Tilly, C. 2001. *Mechanism in Political Process*. *Annual Review Political Science*, hal. 21-41.
- Tilly, C. 2002. *Event Catalogue as Theories*. *Sociological Theory* vol.20, No.2, 248-254.
- Tilly, C. 2005. *Regimes and Repertoires*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, C. D. McAdam. S. Tarrow. 2008. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.